

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memberikan kemajuan dan kemudahan dalam dunia keuangan digital salah satunya adalah *trading binary option* yang merupakan jenis perdagangan yang ilegal di Indonesia, namun kehadirannya diperparah dengan banyaknya publik figur yang mempromosikannya sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Pada Putusan Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng pelaku dikenakan Pasal tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang. Namun pada putusan tersebut korban tidak diberikannya pengembalian atas kerugiannya sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana semestinya. Metode penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi korban diatur secara tidak langsung dalam KUHP dan KUHAP, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan kajian viktimologi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan *trading binary option* belum diberikan sebagaimana semestinya yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi korban. Perlindungan yang seharusnya di dapatkan bagi korban berupa restitusi, serta penggabungan tuntutan ganti kerugian dan gugatan perdata.

Kata Kunci: *Trading binary option*, Perlindungan hukum bagi korban, Viktimologi

ABSTRACT

The development of technology provides progress and convenience in the world of digital finance, one of which is binary option trading which is a type of trade that is illegal in Indonesia, but its presence is exacerbated by the number of public figures who promote it, causing losses to victims. In the Tangerang District Court Decision Number: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, the perpetrator was charged with the article of the crime of spreading false and misleading news which resulted in consumer losses in Electronic Transactions and Money Laundering. However, in the verdict the victim was not given a refund for his losses so that the victim did not get legal protection as he should. The research method used in this research is qualitative with a normative juridical approach. The specifications used in this research are descriptive analytical using the type of data in the form of primary data and secondary data collected through literature studies. The results showed that legal protection for victims is regulated indirectly in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, specifically regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. Based on the study of Viktimology, it shows that legal protection for

victims of binary option trading fraud has not been given as it should be which causes injustice and discrimination for victims. Protection that should be obtained for victims in the form of restitution, as well as the combination of compensation claims and civil suits.

Keywords: *Trading binary option, Victims Legal Protection, Victimology,*